

**PERAN KELURAHAN SIAGA BENCANA GUNA
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN
MUKTIHARJO LOR KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Oleh:

David Irawan, Ari Subowo

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon

(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang merugikan atau mengancam kehidupan manusia. Potensi terjadinya suatu bencana selalu ada sepanjang waktu dan bencana dapat terjadi kapan saja maka dari itu dibutuhkan kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana. Dalam menanggulangi bencana Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No 13 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pemerintah melibatkan masyarakat dengan membuat Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dari KSB Muktiharo Lor kecamatan Genuk dalam menanggulangi bencana banjir di Kelurahan Muktharjo Lor Kecamatan Genuk. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan dari KSB dengan pemerintah BPBD. Pemerintah melihat bahwa dibentuknya KSB guna masyarakat sebagai tangan panjang pemerintah dalam menanggulangi bencana dan anggotanya bersifat relawan. Tetapi anggota KSB merasa susah untuk menjadi relawan dan berharap menjadi anggota KSB mendapatkan upah. Perlu koordinasi yang lebih baik agar dalam menanggulangi bencana dapat lebih responsif.

Kata Kunci : BPBD, KSB, Penanggulangan Bencana, Banjir

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan dan tempat bertemunya 2 lempeng samudra pasifik dan hindia dan 2 lempeng benua Asia dan Australia. Secara geologis, negara Indonesia dilintasi poros utama bumi yaitu garis katulistiwa dan bangsa Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, minyak dan gas bumi, keanekaragaman hayati, biota laut dan darat. Tetapi, disamping itu semua bangsa Indonesia memiliki potensi bencana alam yang besar seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Aktivitas pembangunan, industri, produksi, transportasi, konsumsi dan rekreasi untuk tujuan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan hukum dapat dilihat dilakukan secara serempak dan saling berpacu tanpa henti atas nama pembangunan mulai dari pelosok, pedalaman, pedesaan hingga perkotaan. Namun semua pembangunan akan sia-sia jika bencana alam tiba-tiba datang dengan dahsyatnya. Itu semua sudah menjadi resiko hidup manusia di bumi ini. Bumi memang terbatas, manusia tidak bisa mengeksploitasi seenaknya sendiri,

tidak bisa lagi manusia dengan seenaknya menempati bumi tanpa mengindahkan segala resiko bencana alam yang setiap saat dapat terjadi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir dan rob, kekeringan dan masih banyak lagi. Jadi memang bencana terjadi karena aktifitas pembangunan yang tanpa memperhatikan kaidah alam serta tidak menggunakan pertimbangan ilmu pengetahuan dan perilaku yang bijaksana kota maupun desa.

Potensi terjadinya suatu bencana selalu ada sepanjang waktu maka pengelolaan bencana menyeluruh dan terpadu khususnya seperti banjir, longsor kekeringan dan tsunami adalah hal yang sangat penting untuk semua pihak. Pengelolaan bencana merupakan proses yang harus dilakukan secara kontinyu dan bukan tindakan yang sesaat.

Penanggulangan bencana itu sendiri menurut Undang Undang No 24 tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Melaksanakan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dalam artian pemerintah daerah pun mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap masyarakatnya agar setidaknya merasa lebih aman terhadap ancaman bencana yang kapan saja bisa terjadi. Tidak terkecuali dengan kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan

penanggulangan bencana. Sebagaimana halnya Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kota metropolitan.

Salah satu penyebab Kota Semarang menjadi langganan banjir adalah dengan adanya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus seperti yang terjadi di Kecamatan Genuk. Kecamatan Genuk merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) IV. Wilayah ini berfungsi sebagai kawasan industri, perdagangan dan jasa. Sehingga dilihat dari pola penggunaan lahannya sebagian besar berupa bangunan dan pemukiman yaitu sebesar 1097.148 Ha (BPS Kecamatan Genuk, 2011). Pola bangunan yang berupa bangunan dan pemukiman inilah yang menyebabkan daerah Genuk menjadi sangat padat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2013 penduduk kesamatan Genuk yaitu sekitar 101,895 jiwa orang. Genuk yang sebagai kawasan Industri, perdagangan dan jasa menjadikan banyaknya bangunan dan pemukiman yang ada disana dan menyebabkan daerah rawan bencana kususnya bencana banjir.

Salah satu program dari BPBD Kota Semarang adalah dengan membuat Kelurahan Siaga Bencana (KSB). KSB di kota Semarang kini berjumlah 22 yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang. Pembentukan KSB berdasarkan wilayah yang sering kali terjadi bencana. Pembentukan KSB sendiri dimulai pada atahun 2013 dimana pada tahun 2013 BPBD menganggarkan Rp. 150.000.000,- dalam pembuatan organisasi yang bersifat

kemasyarakat tersebut. Pada tahun anggaran berikutnya atau tahun 2014, BPBD kembali menganggarkan Rp. 150.000.000,- untuk menunjang kinerja dari KSB. Pada tahun 2015 dilakukan kembali penguatan dengan menanggarkan Rp. 100.000.000,- guna pelatihan bagi para anggota KSB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Faktor apa yang berkaitan dengan peran KSB dalam penanggulangan banjir di kelurahan Muktiharjo lor Kec Genuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang..
2. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan peran KSB dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang.

D. Kajian Pustaka

1. Manajemen

Luther Gulick (Handoko:2011) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat

sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subyektif. Tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang.

Pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi menurut Goerge. R Terry dalam penelitian skripsi terdahulu Widiyarsi (2016) memberikan empat fungsi dasar manajemen yang disingkat menjadi POAC seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

1. *Planning*

Upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dituangkan dalam bentuk konsep atau suatu program kerja.

2. *Organizing*

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan, dan hubungan antarfungsi.

3. *Actuating*

Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

4. *Controlling*

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan sehingga selama perjalanan kegiatan, kelemahannya akan diketahui dengan cepat dan sesegera mungkin dikoreksi. Kegiatan yang telah dievaluasi akan dijadikan bahan rekomendasi kegiatan yang akan datang

2. Manajemen Normatif

Pendekatan Manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektivitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan dan dikontrol secara efisien. Manajemen normatif sejak pembentukannya lebih bersifat "*profit oriented*" atau "*business oriented*" dan karena itu dianggap tidak cocok dengan ideology administrasi publik yang lebih berorientasi terhadap "*public policy*" aliran manajemen normatif mudah dikenal melalui rumusan fungsi-fungsi manajemen bisnis sebagaimana pernah ditiru oleh POSDCORB.

3. Manajemen Diskriptif

Pendekatan manajemen diskriptif dapat diamati dari karya H. Mintzberg (1973). Mintzberg memberikan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh seorang manajer ditempat kerjanya. Menurut Mintzberg, fungsi manajemen yang benar-benar dijalankan adalah kegiatan personal, interaktif administratif dan teknis. Jenis pertama adalah kegiatan personal, yaitu kegiatan yang

dilakukan manajer untuk mengatur waktunya sendiri, berbicara dengan para broker, mengadiri pertandingan dan kegiatan kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau keluarganya. Dalam konteks organisasi, kegiatan-kegiatan ini mungkin dianggap tidak penting tetapi sebagai manusia seorang manajer pasti terlibat bahkan kandungan kandungan menentukan keberhasilan kariernya.

Jenis kegiatan kedua adalah kegiatan interaktif, manajer biasanya menggunakan banyak waktu untuk melakukan interaksi dengan bawahannya atasan customer organisasi lain dan pemimpin-pemimpin masyarakatperanan yang diperankan oleh manajer dalam konteks tersebut terdiri dari interpersonal informational dan pembuat keputusan.

4. Manajemen Strategik

Pada dasarnya manajemen strategik merupakan perpaduan antara konsep manajemen dan strategik. Manajemen dapat diartikan sebagai proses penggerakan orang dan bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategik dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistemik dalam menjalankan fungsifungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi efisien dan efektif.

Nawawi dalam Pasolong (2007:90) merumuskan empat definisi manajemen strategik yaitu :

- 1) Manajemen strategik adalah “proses atau rangkaian kegiatan disertai penetapan melaksanakannya, yang dibuat oleh

manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

- 2) Manajemen strategik adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai misi yang ditentukan.
- 3) Manajemen strategik adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencaapi tujuan.
- 4) Manajemen strategik adalah perencanaan berskala jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai putusan manajerial puncak, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

5. Manajemen Publik

Manajemen Publik merupakan suatu spesialisasi yang relatif baru, tetapi berakar dari pendekatan normatif. Woodrow Wilson - penulis "*The Study of Administration*" di tahun 1887 yang merupakan pionernya. Aliran ini yang dibicarakan benar-benar manajemen publik. Wilson dalam tulisannya, mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut dunia bisnis (*more businesslike*), perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode pemerintahan. Fokus dari ajakan

tersebut adalah melakukan perbaikan fungsi eksekutif dalam tubuh pemerintahan karena waktu itu dinilai telah berada di luar batas kewajaran sebagai akibat dari merebaknya gejala korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan mengadopsi prinsip manajemen bisnis.

Wilson meletakkan 4 (empat) prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu

- 1) Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi;
- 2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;
- 3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
- 4) Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

6. Peran Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat. Konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Peran ibarat karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur tertentu. (Renda, 2015:28)

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Renda (2015:28), teori peran ini

merupakan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Renda (2015:29), mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, 1964: Oswald, Masholder, & Harris, 1997) dalam Renda (2015:29).

Menurut Ilyas (2003:28) peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu tingkat tertentu dan biasanya diharapkan dari seseorang atau lembaga.

E. Pembahasan

1. Peran KSB dalam Penanggulangan Bencana di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk

Latar belakang Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No 13 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah menimbang beberapa hal seperti bahwa Kota Semarang secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam; bencana non alam dari berbagai

aktivitas manusia termasuk di dalamnya bencana akibat kegagalan teknologi, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; serta bencana sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa.

Penelitian peran KSB dalam Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 guna Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk ini guna mengetahui bagaimana peran KSB dalam penanggulangan bencana dan apa saja kendala dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 guna Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal (4) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya

bencana;

- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4 huruf d diatas berbunyi bahwa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana adalah salah satunya dengan adanya KSB. Kelurahan Siaga Bencana merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Mengetahui bagaimana dan kendala peran KSB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2010 dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen menurut Goerge Terry yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian(*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

2 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar pencapaian dari kebijakan dapat

terlaksana. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi KSB, tujuan dari dibentuknya KSB dan tugas-tugas dari KSB. Tahap ini akan membawa kita terhadap bagaimana tugas-tugas atau program dari KSB terhadap penanggulangan bencana serta tujuan dari KSB Muktiharjo dibentuk.

Kelurahan siaga bencana atau KSB dibentuk oleh BPBD. Pembentukan KSB diharapkan sebagai tangan panjang dari pemerintah guna penyelenggaraan bencana. KSB merupakan organisasi dimana anggotanya berasal dari masyarakat. Pemerintah melalui BPBD ingin mengajak masyarakat ikut mengimplementasikan kebijakan atau ikut dalam menangani permasalahan publik. Program-program KSB antara lain sosialisasi tanggap bencana, piket jaga posko, menerka terjadinya ancaman bencana, pelatihan-pelatihan, memberikan informasi dan menyebarkan informasi mengenai ancaman bencana dan melakukan rapat dengan masyarakat setempat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Tujuan utama dibentuknya KSB adalah pemerintah berharap bahwa dari adanya KSB akan terbentuk masyarakat tanggap bencana. Masyarakat tanggap bencana artinya masyarakat lebih siap dan lebih tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman bencana.

Organisasi KSB memiliki struktur yang jelas, jadwal kegiatan yang jelas dan siap memberikan informasi apapun yang bisa beresiko akan terjadi bencana. Struktur organisasi KSB berisikan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seksi prasarana, seksi evakuasi, seksi komunikasi, seksi umum dan seksi kesehatan. Bukan hanya struktur organisasinya saja yang jelas melainkan jadwal kerja yang dimiliki KSB Muktiharjo Lor juga sangat jelas. Telah disepakati bersama oleh organisasi KSB bahwa telah disusun jadwal piket posko yang dilakukan selama 24 jam. Dalam piket tersebut setiap anggota akan secara bergantian menjaga dan mengawasi cuaca di sekitar Kelurahan serta senantiasa berkomunikasi langsung menggunakan HT dengan BPBD Kota Semarang. Piket yang dilaksanakan oleh tiap – tiap anggota tidak hanya dilakukan ketika mendekati bulan-bulan atau musim rawan terjadinya bencana banjir, tetapi piket dilaksanakan setiap hari. Sekecil apapun ancaman bencana seperti awan mendung akan dilaporkan kepada BPBD agar ketika suatu saat terjadi bencana pemerintah serta masyarakat sudah siap untuk menghadapinya.

3. **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Tahap Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia mengetahui bagaimana struktur

organisasi KSB serta bagaimana sumberdaya manusia yang dimiliki KSB guna penanggulangan bencana. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur dan metode dari KSB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Mendayagunakan struktur organisasi dan personalia atau anggota organisasi menurut Edwards (Subarsono, 2012:92) struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hambatan oleh struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama yakni prosedur-prosedur kerja atau ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman bagi para implementor bertindak. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit organisasi.

Hasil wawancara dan observasi, KSB Muktiharjo Lor memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan program

penanggulangan bencana. Berbagai permasalahannya seperti sebagian anggota KSB adalah pekerja maka terdapat hambatan melaksanakan kegiatan seperti pelatihan akan terganggu oleh tanggungjawab pekerjaan, kendala di umur para anggota atau relawan KSB kebanyakan relawan KSB adalah masyarakat yang sudah tua untuk remaja banyak yang enggan bergabung dengan KSB, dibutuhkan tenaga remaja ketika terjadi bencana guna penyelamatan, peran wanita yang kurang atau minim serta pihak KSB menitik beratkan kendala pada sumber dana atau anggaran.

Permasalahannya sebagian anggota KSB adalah pekerja maka terdapat hambatan melaksanakan kegiatan seperti pelatihan akan terganggu oleh tanggungjawab pekerjaan. Permasalahan seperti ini merupakan permasalahan kuantitas dari anggota KSB Muktiharjo Lor. Para anggota KSB Muktiharjo Lor kebanyakan merupakan para pekerja dan juga pensiunan. Untuk melakukan tugas piket serta jaga posko masih bisa dilakukan karena piket menjaga posko dilakukan secara bergantian tiap anggota dan dilakukan 24 jam dalam sehari, tetapi para anggota yang mayoritas memiliki pekerjaan akan kesulitan jika dari pihak BPBD memberikan pelatihan – pelatihan tanggap bencana karena para anggota KSB Muktiharjo Lor yang memiliki pekerjaan

akan lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang mengikuti pelatihan yang diberikan oleh BPBD Kota Semarang.

4. Pelaksanaan (*Actuating*)

Persoalan dalam pelaksanaan dari kelurahan siaga bencana Muktiharjo Lor dalam menanggulangi bencana adalah tentang pembiayaan program atau tentang anggaran dana. Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi seberapa pentingnya anggaran dana, sarana prasana dan juga kualitas SDM yang mendukungnya sangatlah penting karena dana, sarana maupun kualitas SDM merupakan faktor utama dalam berjalannya suatu program. Selain beberapa permasalahan mengenai relawana KSB, KSB Muktiharjo Lor menitikberatkan kendala pada sumber dana atau anggaran. Dari hasil penelitian KSB Muktiharjo Lor membutuhkan bantuan anggaran dana dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. KSB Muktiharjo Lor memerlukan dana operasional untuk diberikan kepada anggota yang berupa dana *cash money* atau semacam gaji untuk para anggota. Anggota KSB Muktiharjo Lor merupakan masyarakat sekitar Kelurahan Muktiharjo Lor dan mayoritas sudah memiliki keluarga dan pekerjaan. Secara otomatis menjadi anggota KSB dan melakukan tugas keseharian sebagai anggota KSB

tidak menjadi prioritas utama. Untuk mengajak para kaum muda atau remaja menjadi anggota relawan KSB Muktiharjo Lor sangat susah apalagi tidak adanya dana atau gaji bagi para anggota KSB Muktiharjo Lor. Mengikutsertakan remaja untuk mengikuti kegiatan sosial tanpa ada insentif bagi masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor akan sangat sulit.

Anggaran dana dari BPBD Kota Semarang kepada KSB Muktiharjo Lor diberikan tidak berupa *cash money* atau uang secara cash tetapi melainkan dialirkan melalui kegiatan – kegiatan sosialisasi atau pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan para anggota KSB Muktiharjo Lor agar para anggota KSB Muktiharjo Lor menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. BPBD Kota Semarang melihat bahwa dibentuknya KSB Muktiharjo Lor adalah untuk wadah bagi masyarakat atau organisasi masyarakat dibawah pemerintah atau yang bekerjasama terhadap pemerintah guna penanggulangan bencana. BPBD Kota Semarang menggunakan paradigma good governance dimana di dalam pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan tidak hanya tanggungjawab dari pemerintah tetapi masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan atau dengan kata lain masyarakat dilibatkan langsung dalam

pelaksanaan kebijakan. Karena masalah seperti bencana alam bukan hanya pemerintah yang menerima dampaknya tetapi masyarakat juga menerima dampak langsung terjadinya suatu bencana.

Namun uang atau dana bukanlah hal yang paling utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan bukan merupakan jawaban dari berbagai masalah yang timbul. Dalam kenyataannya dengan anggaran dana belum tentu juga akan mendapatkan personil yang terampil. Anggaran dana memang hal penting tetapi tidak bisa dijadikan patokan utama dalam mengukur apakah dengan adanya anggaran dana besar menjadikan keterampilan dan kinerja dari anggota KSB Muktiharjo Lor bisa lebih efektif. Diperlukan juga kedewasaan masyarakat dalam menghadapi masalah dan menjadi mitra dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Karena dalam era paradigma *Good Governance* seperti saat ini, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam menghadapi permasalahan publik.

Sumberdaya yang dimiliki KSB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan prosedur atau SOP dan metode-metode penanggulangan bencana. SOP menjadi pedoman bagi para implementor dalam bertindak. Dalam penyelenggaraan bencana terdapat prosedur prosedur yang

harus diperhatikan. Prosedur kesiapsiagaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu melibatkan *stakeholder* lainnya. Stakeholder yang dimaksud adalah Forum kebencanaan atau KSB dan dinas-dinas terkait seperti contoh Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan lain-lain.

SOP secara umum dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait yang dilaksanakan dari tahapan pra, saat hingga pasca bencana. SOP dapat disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan umpan balik yang diterima dari kegiatan pengelolaan bencana baik dokumentasi, *share dialog learning*, dan kegiatan lainnya. SOP ini bertujuan agar setiap kegiatan pengelolaan bencana menjadi jelas pelaksanaannya dan sasaran yang ingin dilaksanakan tercapai. SOP pengelolaan bencana merupakan bentuk riil penyelesaian pengelolaan bencana yang harus disepakati oleh seluruh *stakeholder* agar setiap *stakeholder* tahu kapasitasnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

Setelah mengetahui bahwa telah terdapat SOP yang mengatur tentang penanggulangan bencana terhadap para *stakeholder* maka diperlukan metode-metode dalam penanggulangan bencana di Kelurahan Muktiharjo Lor khususnya

bencana banjir. Metode dalam penanggulangan bencana banjir dilakukan pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana. Untuk menanggulangi bencana banjir banyak hal yang harus dilakukan diantaranya seperti berikut:

Sebelum terjadi banjir:

- Memembersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air sehingga mengakibatkan terjadinya banjir.
- Mengeruk sungai untuk menambah daya tampung air.
- Membangun rute-rute drainase alternatif (kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa), sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai.
- Tidak mendirikan bangunan pada wilayah yang menjadi daerah lokasi penyerapan air atau daerah tangkapan hujan, terutama daerah hulu sungai.
- Tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hujan lebat secara terus menerus air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah bahkan akan menggerus tanah. Hal ini juga akan menyebabkan tanah longsor.

Pada saat terjadi banjir:

- Mengerahkan tim penyelamat beserta bahan dan peralatan pendukung,

seperti perahu karet, tambang, pelampung, dan obat-obatan.

- Membawa korban ke tempat yang aman atau penampungan sementara.
- Mementau perkembangan keadaan banjir dan menyebarkan informasi kepada masyarakat

Pasca terjadi banjir:

- Memberikan pertolongan medis kepada yang memerlukan.
- Memberikan bantuan obat-obatan dan makanan kepada yang membutuhkan.
- Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak karena banjir.
- Membersihkan sarana dan prasarana yang kotor karena banjir

5. Pengawasan (*Controlling*)

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Monitoring merupakan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang

sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan :

- (1) Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- (2) Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- (3) Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Monitoring yang tepat menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan. Membangun sistem yang saling berhubungan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Dalam membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan bertujuan mengetahui bagaimana komunikasi antar KSB dan BPBD; Respon implementor terhadap bencana yang datang yang akan mempengaruhi ketepatan dalam menanggulangi bencana serta Intensitas dalam pembagian tugas yang dilakukan agen.

Respon implementor terhadap bencana yang datang yang akan mempengaruhi ketepatan dalam menanggulangi bencana. Dalam hal ini implementor merupakan pemerintah. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penanggulangan

bencana. Ketika terjadi bencana maka hal paling menjadi sorotan adalah apakah pemerintah sudah turun tangan. Respon BPBD untuk turun ke daerah yang terjadi bencana akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara KSB dan BPBD. Ketika KSB telah memberikan peringatan dini terjadinya bencana maka dengan begitu pemerintah melalui BPBD akan langsung dapat mengambil langkah atau mengambil keputusan apakah ancaman bencana akan memerlukan bantuan yang seperti apa. Sikap dari pemimpin daerah atau walikota menanggapi terjadinya bencana juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil dalam penanggulangan bencana. Dari hasil wawancara ketika terjadi bencana banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor, Walikota Semarang sempat mengunjungi posko pengungsian bencana, dari hal tersebut bisa dilihat bahwa respon dari implementor atau pemerintah dalam menanggulangi bencana sangat dibutuhkan dan akan mempengaruhi dalam ketepatan dalam mengambil langkah menanggulangi bencana.

F. Penutup

1. Kesimpulan

kesimpulan pemasalahan dari Peran KSB terhadap penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk

Kota Semarang adalah perbedaan keinginan atau pengertian dari pemerintah dalam hal ini BPBD dan masyarakat sebagai anggota dari Organisasi KSB. BPBD melihat KSB adalah bentuk dari Good Governance dimana dalam mengimplementasikan kebijakan tidak hanya tugas dari pemerintah saja melainkan masyarakat dan swasta memiliki andil yang sama dalam menyelesaikan masalah. Status dari anggota KSB adalah relawan dan tidak mendapatkan gaji atau upah. Dari sudut pandang anggota KSB, masyarakat dalam hal ini yang merupakan anggota dari KSB enggan atau susah untuk mengikuti program dari Kelurahan Siaga Bencana karena masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor masih beranggapan bahwa menjadi anggota Kelurahan Siaga Bencana tidak mendapatkan gaji. Pekerjaan yang mendapatkan gaji hanya sedikit saja tidak banyak yang mau untuk melakukan apalagi pekerjaan relawan tanpa adanya gaji atau upah. Padahal seharusnya dalam penerapan Good governance terdapat 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta yang harus berjalan bersama sama dalam menyelesaikan permasalahan public.

2. Saran

Berdasarkan peran KSB terhadap penanggulangan bencana banjir di kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang beberapa permasalahan sehingga belum terciptanya implemtasi yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran dalam Peran Kelurahan Siaga Bencana.

- (1) Meningkatkan profesionalisme terhadap anggota-anggota KSB Muktiharjo Lor dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara teknis seperti pelatihan evakuasi, pelatihan mengidentifikasi ancaman bencana serta pelatihan penyelamatan agar anggota KSB menjadi lebih responsif dalam mengatasi ancaman bencana.
- (2) Peningkatan peran dari karangtaruna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan yang akan mencegah terjadinya bencana.
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan rembug warga yang membahas tentang aspek-aspek ancaman bencana sehingga masyarakat mampu mengetahui ancaman bencana sedini mungkin.
- (4) Memberikan materi pembelajaran bagaimana menjaga lingkungan dan pengertian-pengertian tentang

bahaya bencana kepada anak usia dini agar menumbuhkan rasa simpati terhadap anak dalam menjaga lingkungan.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Damai Darmadi. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Ilyas, Yaslis. 2003. *Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moeloeng Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Robert J. Kodoatie & Rorstam Syarief. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*. Jakarta: yarsif watampone.
- Singarimbun Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3SE
- Sri Suwitri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori Dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- T. Hani Handoko. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Wirman Syarif. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Sumber lain:

- Ferninda Arlista Widyasari. 2016. *Analisis Startegi Pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri Di Dinas koperasi, UMKM Dan Pengelolaan Pasar Kabupateb Jepara*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Hidayati, Istna Putri, Jawoto Sih Setyono, Artiningsih. *Konsep Integrasi Tata Kelola Kebencanaan Di Kota Semarang*. Riptek Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, (Hal. 51 – 64): 2015
- Kecamatan Genuk Dalam Angka Tahun 2012
- Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi BPBD Kotas Semarang
- Renda, CYY. 2015. *Peran Komisi Penaggulangan AIDS Kota Semarang dalam Penyadaran Masyarakat Rentan HIV/AIDS*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Renja BPBD Kota Semarang Tahun 2013
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana